



RILIS
KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) RESES KOMISI X DPR RI
PASA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023—2024
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
TANGGAL 6—10 MEI 2024

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR RI H. Muhammad Nur Purnamasidi dari Fraksi Partai Golkar, dengan anggota tim dari masing-masing perwakilan fraksi. Kunjungan kerja diterima oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, dalam pertemuan di ruang rapat pimpinan pemerintah provinsi dengan dihadiri oleh dinas terkait dan para pemangku kepentingan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, keolahragaan, dan perpustakaan.

Kunjungan kerja ini dihadiri juga oleh pejabat dari mitra kerja Komisi X DPR RI, yaitu Sesditjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Direktur Pengembangan Destinasi II dan Sesdep Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf, Staf Ahli Menpora, dan Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpunas. Pejabat mitra kerja diminta oleh Komisi X untuk hadir agar mendengar dan melihat langsung permasalahan di daerah dan dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam pertemuan dengan Staf Ahli Gubernur Sulsel dan para pemangku kepentingan, tim kunjungan kerja bersama pejabat mitra kerja menyampaikan bantuan APBN TA 2024 hasil pembahasan Komisi X dengan Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Baparekraf, dan Perpunas sejumlah Rp2.657.760.451.672 dalam bentuk DAK dan program/kegiatan. Selain pertemuan dengan para pemangku kepentingan, kunjungan kerja ini juga mengagendakan kunjungan lapangan ke satuan pendidikan di SMAN 17 Makassar dan SMKN 5 Makassar, salah satu industri kreatif Cening, dan destinasi wisata budaya Benteng Rotterdam (*fort Rotterdam*).

Di antara permasalahan yang mengemuka dan disampaikan oleh pemangku kepentingan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu permasalahan guru PPPK yang telah lulus ditempatkan di sekolah negeri dan hal itu berdampak terhadap kekosongan atau berkurangnya guru berkualitas di sekolah swasta. Selanjutnya terdapat usulan dari SMKN 5 Makassar agar alokasi anggaran BOS ditingkatkan dan dibedakan dengan SMA karena kebutuhan SMA berbeda dan lebih besar dari SMP. Selain itu, pemangku kepentingan pendidikan juga menyampaikan permasalahan bahwa gedung SMKN 5 Makassar telah berusia lebih dari 50 tahun, termasuk beberapa peralatannya, sehingga membutuhkan revitalisasi, khususnya jaringan kabel bawah tanahnya. Di bidang lain, terdapat juga berbagai permasalahan dan temuan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan bidang kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, keolahragaan, dan perpustakaan.

Berbagai permasalahan, temuan dan usulan akan menjadi bahan tim kunjungan kerja untuk dilakukan pembahasan bersama pemerintah dalam masa sidang yang akan datang.

Provinsi Sulawesi Selatan, 7 Mei 2024

Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan